



EDISI RABU 18 FEBRUARI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

- 02 GOVERNMENTTODAY
Aturan Baru Dana Desa:
58,03% untuk Koperasi Merah Putih
- 05 NUSANTARA
Rawan! 11 Badara di Papua
Ditutup
- 10 LISTSTYLE
Tampil Mewah Tanpa Gerah dengan
Outfit Silk-Look

JELANG RAMADAN, BANJIR BANDANG SUSULAN TERJANG AGAM

Menjelang pelaksanaan ibsah puasa Ramadan, banjir bandang susulan kembali menerjang kawasan Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Selasa (17/2/2026). Material batu dan pasir kembali menutup permukiman serta akses jalan yang sebelumnya sempat dibersihkan pascabencana November 2025 hingga Januari 2026. Foto udara menunjukkan kerusakan infrastruktur dan timbunan material yang memperlambat aktivitas warga di wilayah terdampak. (ist.antara)

KLAIM TAK TEKEN REVISI UU KPK, JOKOWI 'CUCI TANGAN'?

Klaim Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), bahwa ia tidak menandatangani revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 memicu kegaduhan. Muncul perdebatan baru mengenai tanggung jawab politik di balik perubahan regulasi tersebut. Pernyataan yang disertai dukungan agar UU KPK kembali ke versi lama itupun langsung ditanggapi beragam pihak, dari pimpinan lembaga antirasuah, parlemen, hingga mantan penyidik. Mereka kompak menegaskan proses legislasi kala itu melibatkan pemerintah dan DPR. Juga digarisbawahi, keberlakuan undang-undang tidak ditentukan oleh adanya tanda tangan presiden. Di sisi lain, pegiat antikorupsi menilai sikap tersebut berpotensi dibaca sebagai upaya 'cuci tangan' atas pelemahan kelembagaan KPK pascarevisi. Indonesia Corruption Watch menyebut pernyataan itu paradoksal. Polemik pun bergeser dari soal prosedur legislasi menuju pertanyaan lebih mendasa, apakah klaim tak meneken revisi UU KPK menandai koreksi sikap, atau sekadar jarak politik dari keputusan masa lalu? BACA HAL 11...

SEJUMLAH PASAL PENUH MASALAH

Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 17 September 2019, berpotensi melemahkan KPK.

CACAT FORMAL

- Revisi UU KPK tidak masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2019.
- Pengesahan revisi UU KPK tidak memenuhi kuorum sebanyak dua pertiga anggota DPR.
- Mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan serta mengabaikan masukan publik dan KPK.

CACAT MATERIIL

- **Pembentukan Dewan Pengawas (Pasal 37 A-H)**
Pengawasan KPK sudah ada, baik internal (PIPM) maupun eksternal (BPK, DPR, Presiden, peradilan, publik). Dewan Pengawas dinilai tidak mendesak dan berpotensi jadi lapisan birokrasi tambahan.
- **Kewenangan SP3 (Pasal 40)**
Sebelumnya KPK tak bisa menghentikan perkara agar selektif sejak awal. Dengan SP3, kasus besar bisa dihentikan setelah 2 tahun, padahal tiap perkara punya tingkat kompleksitas berbeda.
- **Izin Penyadapan dari Dewan Pengawas (Pasal 37B huruf b)**
Penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan harus izin tertulis. Ini berpotensi memperlambat proses dan membuka celah intervensi karena izin bisa ditolak.



- **KPK Masuk Rumpun Eksekutif (Pasal 1 ayat 3)**
KPK dikategorikan sebagai lembaga eksekutif. Kritikus menilai ini melemahkan independensi karena lembaga penegak hukum idealnya berdiri terpisah dari cabang kekuasaan.
- **Pegawai KPK Jadi ASN (Pasal 1 ayat 6)**
Status ASN berpotensi mengurangi independensi. Penyidik bisa berada dalam koordinasi struktur birokrasi yang lebih luas, termasuk kepolisian.

ATURAN BARU DANA DESA: 58,03% UNTUK KOPERASI MERAH PUTIH

Pemerintah merombak arah penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026 dengan menjadikan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diteken 12 Februari 2026, Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan 58,03% dari pagu Dana Desa dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dengan total pagu Dana Desa di 2026 sebesar Rp60,57 triliun, porsi untuk implementasi KDMP mencapai Rp34,57 triliun. Sisa anggaran sekitar Rp26 triliun dialokasikan sebagai Dana Desa reguler. “Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp34.570.000.000.000,” bunyi Pasal 15 ayat 3 regulasi tersebut dilihat Selasa (17/2/2026).

Kebijakan baru ini sekaligus mengubah ketentuan sebelumnya yang belum mengatur alokasi khusus bagi koperasi desa. Pemerintah menempatkan KDMP sebagai bagian dari agenda pembangunan



Pengendara sepeda motor melintas di depan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Metuk, Mojosoong, Boyolali, Jawa Tengah. (Dok. Antara)

berkelanjutan, bersanding dengan penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur desa, hingga pengembangan layanan dasar

kesehatan skala desa.

Penggunaan anggaran koperasi diarahkan secara spesifik untuk pembangunan fisik dan operasional, termasuk gerai, pergudangan, serta

POIN-POIN UTAMA PERKEMBANGAN KDMP PER JANUARI 2026:

Target Operasional:

Pemerintah menargetkan 30.000 unit KDMP sudah beroperasi penuh di seluruh Indonesia pada April 2026.

Alokasi Dana Desa:

Berdasarkan aturan terbaru (PMK Nomor 7 Tahun 2026), sebanyak 58,03% Dana Desa tahun 2026 wajib dialokasikan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Syarat Keanggotaan:

Setiap koperasi wajib memiliki minimal 500 anggota. Untuk desa dengan penduduk di bawah jumlah tersebut, pendirian dapat dilakukan melalui skema gabungan antar-desa.

Fasilitas Pinjaman:

Tersedia plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan bunga rendah 6% per tahun dan tenor maksimal 72 bulan untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.

Unit Usaha:

Usaha: Meliputi gerai sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik, cold storage, hingga logistik pangan.

Desa Khawatir Layanan Publik Terganggu

KEBIJAKAN pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi 58,03% Dana Desa tahun 2026 untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai membawa konsekuensi struktural terhadap fungsi fiskal desa. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sekitar Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun diarahkan secara khusus untuk program koperasi desa, sehingga ruang fiskal bagi program reguler menyusut signifikan menjadi sekitar Rp25–26 triliun.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai perubahan tersebut menggeser karakter Dana Desa dari instrumen yang semula lentur menjadi instrumen yang sangat terarah. Menurutnya, penguncian alokasi untuk program prioritas pusat berpotensi menekan fungsi stabilisasi sosial yang selama ini dijalankan desa.

“Ketika alokasi terkunci untuk KDMP, desa menghadapi risiko crowding-out [penyingkiran] terhadap kegiatan yang menjadi bantalan kerentanan,” ujarnya dalam analisis tertulis.

Ia menjelaskan, selama ini Dana

Desa berperan sebagai penyangga ekonomi lokal melalui program padat karya, pemeliharaan infrastruktur skala kecil, respons bencana, serta dukungan layanan dasar masyarakat. Dengan menyempitnya porsi dana reguler, desa dikhawatirkan kehilangan fleksibilitas dalam merespons guncangan ekonomi, fluktuasi harga, maupun kebutuhan mendesak warga karena sebagian besar anggaran telah terikat pada program koperasi.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, Syafruddin mengakui koperasi desa memiliki potensi memperkuat posisi tawar petani dan menurunkan biaya transaksi melalui konsolidasi produksi dan distribusi. Namun ia mengingatkan bahwa besarnya mandat anggaran tidak otomatis menjamin produktivitas ekonomi.

“Dana besar tanpa model bisnis yang tajam menciptakan biaya tetap: angsuran pembangunan fisik, operasional, dan pengadaan yang terus berjalan saat arus kas belum stabil. Kondisi ini mudah melahirkan aset menganggur dan beban sosial ketika warga menilai proyek dari manfaat

yang tidak hadir,” jelasnya.

Ia juga menyoroti skema insentif desa sebesar Rp1 triliun yang dikaitkan dengan kinerja koperasi. Menurutnya, desain insentif tersebut berisiko mendorong kepatuhan administratif semu, di mana desa mengejar serapan anggaran tanpa memastikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Untuk meminimalkan potensi kegagalan, Syafruddin mengusulkan empat pendekatan tata kelola. Pertama, pembatasan belanja fisik sebelum studi kelayakan, proyeksi arus kas konservatif, pemetaan pasar, serta standar operasional prosedur disusun secara memadai. Kedua, penetapan batas minimal anggaran bagi layanan dasar dan perlindungan sosial dalam APBDes agar fungsi penyangga sosial tetap terjaga.

Ketiga, penerapan indikator kinerja berbasis manfaat ekonomi riil, seperti volume transaksi, margin usaha, perputaran persediaan, dan selisih harga produsen terhadap pasar. Keempat, keterbukaan informasi publik terkait kontrak, vendor, rencana anggaran biaya, serta inventaris aset untuk mencegah konflik kepentingan. (dya,ist,rls/dya)

kelengkapan penunjang kegiatan ekonomi desa. Skema penyaluran dana juga dipisahkan dari Dana Desa reguler. Dana untuk KDMP disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penampung khusus, sedangkan Dana Desa reguler tetap melalui mekanisme pemotongan di tingkat kabupaten/kota sebelum masuk ke Rekening Kas Desa.

Regulasi tersebut juga memuat insentif tambahan bagi desa yang dinilai berhasil mengelola koperasi secara optimal. Status pembentukan dan kinerja usaha KDMP menjadi syarat utama bagi desa untuk memperoleh tambahan insentif dari total alokasi Rp1 triliun pada tahun anggaran berjalan.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 82 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut sebanyak 30.008 unit koperasi siap beroperasi tahun ini dengan estimasi penyerapan sekitar 20 tenaga kerja pada setiap proyek pembangunan. Koperasi desa diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus offtaker hasil produksi masyarakat. (wid,rls,ant/dya)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menilai praktik pelanggaran di lapangan masih berlangsung terbuka. Ia menyoroti penggunaan lajur kanan oleh kendaraan berat serta maraknya truk ODOL yang tetap beroperasi, khususnya di ruas padat seperti tol perkotaan. "Laporan masyarakat menunjukkan bahwa sejumlah truk kerap menggunakan jalur kanan yang semestinya diperuntukkan bagi kendaraan ringan untuk mendahului, sehingga memicu perlambatan arus, potensi kecelakaan, dan kemacetan panjang, khususnya pada jam sibuk," ujarnya dalam keterangan di Jakarta dikutip Selasa (17/2/2026).

POIN UTAMA KEBIJAKAN ZERO ODOL 2027

- **Target Waktu:**
Berlaku penuh mulai Januari 2027 setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penundaan sejak 2017.
- **Rantai Tanggung Jawab:**
Penegakan hukum tidak lagi hanya menyasar pengemudi (sopir), tetapi juga mencakup seluruh ekosistem logistik, termasuk pemilik usaha, pemilik barang, hingga industri karoseri.
- **Fokus Keselamatan:**
Data tahun 2024 menunjukkan truk ODOL menyumbang sekitar 10,5% dari total kecelakaan nasional, dengan korban jiwa mencapai 6.000 orang.
- **Penghematan Infrastruktur:**
Praktik ODOL diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp43 triliun per tahun akibat kerusakan jalan nasional.



PEMERINTAH menetapkan pembatasan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi pengendalian lalu lintas nasional. Kebijakan itu berlaku mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026 dan mencakup pembatasan sementara truk angkutan barang di ruas jalan tol maupun arteri utama.

Langkah tersebut ditempuh untuk menekan risiko kecelakaan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas jutaan pemudik pada periode dengan intensitas perjalanan tertinggi dalam setahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan keselamatan publik menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan tersebut. "Keselamatan masyarakat dan kelancaran arus mudik serta balik selama periode Angkutan Lebaran 2026 merupakan prioritas utama pemerintah," ujarnya.

SOROTI PENERTIBAN TRUK 'ODOL', DPR: JANGAN SETENGAH HATI

Desakan penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan menguat di tengah rencana pemerintah menerapkan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027. Tekanan datang dari parlemen seiring keluhan publik atas kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan tol. Diketahui, pemerintah menyiapkan skema pengawasan yang menyasar tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik usaha angkutan barang.



Pemerintah menerapkan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027. (Dok.ist)

Menurut Rano, lajur kanan bukan ruang bagi kendaraan berat berjalan lambat. Praktik ODOL, katanya, bukan sekadar pelanggaran administratif,

melainkan persoalan keselamatan publik dan kepastian hukum. "Kita sudah lama berbicara soal penertiban ODOL, tetapi di lapangan praktiknya

masih terjadi. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati sehingga kalau ada pelanggaran harus ada konsekuensi nyata," katanya.

Ia menilai inkonsistensi penindakan memunculkan persepsi bahwa pelanggaran bisa ditoleransi.

Rano juga menyoroti efektivitas pengawasan berbasis tilang elektronik. Menurutnya, sebagian pengemudi belum menunjukkan kepatuhan yang memadai. Karena itu, ia meminta penguatan patroli dan pengawasan terpadu di titik rawan pelanggaran, serta memastikan sanksi benar-benar dijalankan. Dalam pandangannya, penertiban tidak cukup dilakukan secara sporadis, melainkan perlu pola pengawasan berkelanjutan yang dapat diukur hasilnya.

Menjelang Ramadan, ketika mobilitas diperkirakan meningkat, ia mendorong rekayasa lalu lintas yang terukur.

Opsi yang diajukan mencakup pembatasan jam operasional kendaraan berat, patroli rutin di koridor padat, serta koordinasi lebih solid antara Polri, Kementerian Perhubungan, dan pengelola jalan tol. "Masyarakat menunggu langkah nyata, dan saya percaya aparat bisa merespons dengan cepat dan terukur," tuturnya. Ia menambahkan, koordinasi lintas lembaga penting agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri di lapangan.

Parlemen juga menekankan dimensi kerusakan infrastruktur. Rano menilai kendaraan bermuatan berlebih mempercepat degradasi jalan dan meningkatkan biaya pemeliharaan negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut merugikan pengguna jalan dan memperlemah keandalan jaringan logistik. Karena itu, penegakan aturan dipandang sebagai bagian dari perlindungan kepentingan publik.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan kebijakan zero ODOL tetap berjalan sesuai jadwal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan implementasi direncanakan efektif pada awal 2027 setelah melalui tahap edukasi dan koordinasi lintas lembaga.

Arus Mudik 2026: Truk Dibatasi 13-29 Maret

Ia menegaskan pembatasan dilakukan semata untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan nyaman selama masa angkutan Lebaran.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan balik. Dokumen itu ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri sebagai kerangka koordinasi lintas lembaga dalam pengendalian lalu lintas nasional pada periode Lebaran.

Menurut Dudy, keputusan membatasi operasional angkutan barang selama 16 hari diambil berdasarkan evaluasi kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan pada periode angkutan Lebaran tahun-tahun sebelumnya, serta hasil analisis pemodelan lalu lintas yang dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Data kepolisian tahun 2024 menunjukkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang mencapai 27.337 kejadian, setara 10,4

persen dari total kecelakaan nasional. Pada periode yang sama, kendaraan over dimension over loading (ODOL) tercatat sebagai penyebab kecelakaan terbesar kedua dengan korban meninggal dunia sebanyak 6.390 orang.

Pemerintah menilai peningkatan volume kendaraan berat pada masa puncak mudik memiliki dampak langsung terhadap kecepatan rata-rata lalu lintas dan potensi kemacetan. Setiap kenaikan proporsi kendaraan berat dipandang berkontribusi signifikan terhadap perlambatan arus kendaraan, terutama di koridor distribusi utama dan akses menuju kawasan perkotaan.

Meski demikian, pembatasan tidak berlaku bagi seluruh jenis angkutan barang. Kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan gas, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang kebutuhan pokok tetap diizinkan beroperasi dengan syarat tidak melebihi batas dimensi dan muatan. Pemerintah menilai pengecualian tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas distribusi logistik strategis selama periode mudik. (wid,rls/dya)

Standar Kelayakan Jamaah Haji

INDONESIA USUL BERBASIS KESEHATAN, BUKAN USIA

Pemerintah Indonesia memperluas kerangka kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dengan menempatkan kesehatan dan kebugaran sebagai indikator utama kelayakan berangkat. Diketahui, saat ini pendekatan berbasis usia kerap menjadi rujukan administratif. Pergeseran orientasi ini berjalan paralel dengan penguatan perlindungan bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi pada musim haji 2026, sekaligus menjadi respons kebijakan atas tingginya beban kesehatan jemaah pada musim-musim sebelumnya.

Dalam komunikasi bilateral dengan otoritas Arab Saudi, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa batas usia tidak selalu berkorelasi dengan kesiapan fisik.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan parameter kesehatan harus ditempatkan sebagai ukuran yang lebih adil dan akurat. Dalam pernyataan yang disiarkan Selasa (17/2/2026), ia menyebut, "Kami minta ukurannya bukan umur. Ukurannya harus tetap kesehatan, fitness-nya gitu lho. Karena ada orang yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, tapi fit lho Mas."

Ia menambahkan, heterogenitas kondisi fisik justru menunjukkan bahwa sebagian jemaah yang lebih muda tidak selalu berada dalam keadaan sehat. "Tapi yang dari kota, umur 40 tahun, 50 tahun tapi enggak fit. Jadi ukurannya kami bilang jangan umur dong," kata Dahnil.

Wacana pembatasan usia yang sempat mengemuka--termasuk gagasan agar jemaah di atas 90 tahun tidak diberangkatkan--dinilai tidak sepenuhnya memenuhi asas keadilan substantif. "Di awal sempat disampaikan ingin supaya umur yang 90 tahun ke atas enggak boleh berangkat. Tapi kami sampaikan enggak fair kalau ukurannya adalah umur, yang paling fair itu adalah ukurannya kesehatan," ujarnya.

Penekanan pada istitha'ah kesehatan diproyeksikan sebagai instrumen mitigasi risiko, setelah data musim haji 2025 menunjukkan sekitar separuh dari 467 jemaah yang wafat di Tanah Suci merupakan jemaah asal Indonesia. Karena itu, skrining medis menyeluruh, pengendalian komorbid, serta edukasi kebugaran menjadi prasyarat operasional bagi seluruh calon jemaah, termasuk pada skema haji khusus.

"Karena memang pemerintah Saudi dan kita juga itu berkomitmen untuk bareng-bareng memastikan menekan jumlah kematian supaya kemudian yang berangkat ke sana itu benar-benar sehat, fit," kata Dahnil.

Penguatan aspek kesehatan dipadukan dengan rekayasa operasional di lapangan. Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, menempatkan perlindungan jemaah lansia dan berisiko tinggi sebagai prioritas penyelenggaraan haji 2026.

Dalam forum Saudi-Indonesia Umrah Co.Exchange di Makkah yang dilaporkan kumparan, ia menegaskan



Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter (Bekasi) JKS dan Kertajati (KJT) memandu jemaah haji ketika melakukan Tawaf Wada pada gladi posko layanan operasional Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, 10 Februari 2026. (Dok.antara).

bahwa istitha'ah kesehatan harus dipahami sebagai fondasi keselamatan, bukan sekadar syarat administratif.

"Perlindungan jemaah, khususnya lansia dan risti, adalah prioritas utama kami pada penyelenggaraan haji tahun ini," tegasnya. Ia menambahkan,

"Istitha'ah kesehatan adalah fondasi utama. Kita ingin memastikan jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik, terkontrol penyakit penyertanya, serta memahami risiko perjalanan ibadah."

Pendekatan preventif tersebut

Timwas Haji DPR 2026 Sudah Dibentuk, Posisi Ketua Kosong

KOMISI VIII DPR memastikan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 telah resmi dibentuk, meskipun penunjukan ketua tim masih menunggu keputusan dari pimpinan DPR. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa susunan Timwas terdiri atas pimpinan DPR, termasuk ketua dan wakil ketua, serta melibatkan pimpinan dan anggota komisi-komisi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji.

Pernyataan itu disampaikan Marwan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/2/2025). Ia menjelaskan, keanggotaan Timwas tidak hanya berasal dari pimpinan DPR, tetapi juga mencakup anggota komisi yang membidangi aspek operasional haji, seperti transportasi udara, armada pendukung, pengurusan visa, dan kementerian terkait.

"Ya pimpinan DPR, ketua-wakil ketua DPR menjadi timwas. Kemudian berbagai komisi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Umpamanya terkait pesawat, terkait armada yang lain. Kemudian terkait visa dan lain-lain

ya kementerian yang terkait itu di komisinya dilibatkan," ujarnya.

Marwan menambahkan, nama-nama anggota Timwas sudah diajukan untuk mendapatkan visa pengawas, dan saat ini masih dalam proses administrasi. Ia menegaskan bahwa tugas pengawasan secara formal baru akan dijalankan ketika pemberangkatan jemaah dimulai.

"Nama-namanya juga sudah kita usulkan untuk mendapatkan visa pengawas. Sekarang lagi berproses. Tentu tugas sebagai timwas itu secara melekat belum, sekarang. Itu nanti setelah mulai pemberangkatan," kata Marwan.

Terkait penunjukan ketua Timwas, Marwan mengakui bahwa pimpinan DPR belum mengambil keputusan final. Dalam praktiknya, apabila pimpinan tidak menetapkan ketua secara resmi, posisi tersebut biasanya dipegang oleh wakil ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat. Namun keputusan akhir tetap bergantung pada rapat pimpinan DPR. "Pimpinan DPR belum memutuskan," ujarnya.

"Biasanya kalau tidak

diterjemahkan dalam manajemen mobilitas pada fase puncak ibadah. Pemerintah mengoptimalkan skema Murur--yang memungkinkan jemaah lansia dan berisiko tinggi melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus. Serta skema Tanazul yang memberi opsi sebagian jemaah kembali lebih awal ke hotel setelah melontar jumrah untuk mengurangi kepadatan di Mina.

"Murur dan Tanazul bukan hanya solusi teknis, tetapi bentuk keberpihakan pada jemaah rentan. Prinsipnya, ibadah harus sah sekaligus aman dan manusiawi," ujar Irfan. (wid,rls,ist/dya)

JADWAL KEBERANGKATAN DAN PEMULANGAN

- **21 April 2026:**
Jemaah mulai masuk ke Asrama Haji.
- **22 April 2026:**
Kebangkatan kloter pertama (Gelombang I) menuju Madinah.
- **7 Mei 2026:**
Kebangkatan Gelombang II menuju Makkah.
- **21 Mei 2026:**
Batas akhir kedatangan penerbangan internasional jemaah haji di Arab Saudi.
- **1 Juni 2026:**
Awal pemulangan jemaahnya haji ke Indonesia.



diputuskan, secara otomatis ketuanya wakil ketua (DPR) yang membidangi kerkesra. Kecuali mereka rapat, pimpinan rapat. Siapa yang menjadi ketua tim, itu kita serahkan saja ke pimpinan," tambahnya.

Langkah pembentukan Timwas ini sejalan dengan persiapan pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara lebih sistematis dan aman. (wid,ant,nu/dya)

RAWAN! 11 BANDARA DI PAPUA DITUTUP

Pemerintah menghentikan sementara operasional 11 bandar udara dan lapangan terbang perintis di Papua. Langkah ini diambil usai insiden penembakan terhadap pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah-Danawage/Koroway Batu, 11 Februari 2026. Kebijakan itu ditempuh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai respons atas meningkatnya risiko keamanan pada layanan penerbangan perintis.

Jalur perintis vital menopang akses kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, serta mobilitas dasar masyarakat di wilayah terpencil. Namun, pemerintah memutuskan menutup 11 lokasi penerbangan di Papua.

Direktur Jenderal Perhubungan



Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Reskrim Umum Polda Papua dan Reskrim Polres Boven Digoel melaksanakan olah tempat kejadian perkara di Bandara Koroway Batu, Jumat (13/2/2026). (Dok. Humas Operasi Damai Cartenz)

Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prasyarat utama beroperasinya kembali bandara-bandara tersebut. "Kegiatan operasional pada bandara-bandara

tersebut akan dibuka kembali setelah mendapat pengamanan dari aparat TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan,"

11 Bandara atau Satuan Pelayanan (Satpel) dan Lapangan Terbang (lapter) yang Ditutup

- Satpel Koroway Batu
- Bandara Bomakia
- Satpel Yaniruma
- Satpel Manggelum
- Lapter Kapiroya
- Lapter Iwur
- Lapter Faowi
- Lapter Dagai
- Lapter Aboy
- Lapter Teraplu
- Lapter Beoga

Daftar Peristiwa penembakan di wilayah Papua

- **Penembakan Pesawat Smart Air (11 Februari 2026):**
Kelompok bersenjata menembaki pesawat Smart Air saat mendarat di Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan. Insiden ini mengakibatkan pilot dan kopilot meninggal dunia.
- **Penembakan di Area Mile 50 Freeport (11 Februari 2026):**
Terjadi kontak tembak di wilayah Mile 50 PT Freeport Indonesia, Timika. Seorang prajurit TNI dari Kodim 1710/Mimika dilaporkan gugur dalam peristiwa tersebut.
- **Insiden Menonjol di Yahukimo (April 2025):**
Penyerangan terhadap pendulang emas di Yahukimo mengakibatkan 11 warga sipil tewas mengenaskan akibat luka senjata tajam dan api.
- **Rentetan Aksi Juni 2025:**
Terjadi 8 aksi kekerasan yang mencakup penembakan pekerja bangunan gereja, pembacokan anggota Polri di Supaga, dan penembakan anggota TNI di Yahukimo.



AKSI kekerasan bersenjata di Papua dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga menekan denyut pembangunan dan akses hidup warga sipil.

Direktur Nusantara Parameter Index, Murmahudi, menilai serangan terhadap fasilitas sipil dan aparat

Kekerasan Bersenjata di Papua Pukul Layanan Publik

keamanan merupakan bentuk teror yang menghambat ekosistem pembangunan di wilayah tersebut. Penilaian itu mengemuka setelah insiden penembakan pesawat perintis PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, serta penembakan terhadap personel TNI di kawasan Tembagapura, Mimika.

Murmahudi menyebut rangkaian kekerasan itu berdampak langsung pada keberlangsungan layanan publik. "Kekejian yang dilakukan KKB merupakan teror kemanusiaan. Penyerangan pesawat perintis, pembunuhan pegawai sekolah, guru dan tenaga medis serta penembakan terhadap aparat keamanan, teror ini bukan hanya keamanan yang terganggu, tetapi seluruh ekosistem pembangunan Papua," ujarnya.

Menurutnya, bandara perintis di Papua merupakan objek vital yang menjadi urat nadi distribusi logistik, bahan pangan, layanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat di daerah terpencil.

Ia menekankan bahwa gangguan terhadap penerbangan sipil berimplikasi langsung pada kehidupan sehari-hari warga. "Tanpa penerbangan perintis, harga kebutuhan melonjak, layanan medis

terhenti, guru dan tenaga kesehatan sulit masuk. KKB dengan sadar menciptakan isolasi dan keteringgalan, lalu rakyat sipil yang menanggung akibatnya," kata Murmahudi.

Ia menilai pola serangan yang menyasar objek vital berpotensi menimbulkan rasa takut di kalangan operator sipil dan mengganggu kesinambungan layanan publik.

Dalam kerangka keamanan nasional, pemerintah mempertebal pengamanan objek vital di Papua, termasuk kawasan penerbangan perintis dan wilayah operasional strategis.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamar Chaniago, menyatakan penguatan pengamanan dilakukan agar peristiwa serupa tidak berulang. "Penguatan pengamanan dilakukan agar peristiwa serupa tidak berulang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan tenang," ujarnya.

Pemerintah, kata Djamar, menempatkan bandara perintis dan jalur logistik sebagai prioritas perlindungan, termasuk dengan penambahan personel pengamanan di titik-titik strategis seperti Koroway dan kawasan operasional di Tembagapura. (wid,ist,ant/dya)

ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, "Penerbangan perintis merupakan layanan vital dalam mendukung konektivitas masyarakat Papua, khususnya untuk akses kesehatan, pendidikan, distribusi logistik, serta mobilitas dasar masyarakat di wilayah terpencil, sehingga keamanannya sangat krusial dan harus dijaga."

Selabel titik yang dihentikan operasionalnya meliputi Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Lapter Kapiroya, Lapter Iwur, Lapter Faowi, Lapter Dagai, Lapter Aboy, Lapter Teraplu, dan Lapter Beoga. Penghentian berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, menunggu jaminan keamanan dari aparat serta pemenuhan standar keselamatan penerbangan.

Pemerintah menekankan bahwa operator yang menghentikan penerbangan karena alasan keamanan tidak akan dikenakan sanksi, dan operator diberi kewenangan melakukan penilaian risiko untuk menentukan keberlanjutan operasional.

Di saat yang sama, terdapat lima bandara dengan status rawan namun dinilai masih terkendali karena penjagaan aparat, yakni Bandara Kiwirok, Bandara Moanamani, Satpel Sinak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, dan Bandara Illu. Operasional di lokasi tersebut tetap berjalan dengan pengawasan ketat terhadap dinamika keamanan setempat.

Otoritas penerbangan juga memetakan profil risiko tiap bandara, merancang prosedur operasi standar khusus bagi kru pesawat di area rawan, serta menyiapkan penguatan dasar hukum penghentian sementara operasional apabila kondisi keamanan tidak terpenuhi.

Pemerintah mempertimbangkan pembentukan Surat Keputusan Bersama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memperkuat pelaksanaan angkutan udara perintis di wilayah berisiko tinggi.

Koordinasi pengamanan dilakukan bersama TNI dan Polri. Aparat memperkuat penjagaan di bandara terpencil dan lapangan terbang perintis, sekaligus menghitung kebutuhan personel tambahan untuk pengamanan berlapis.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan unsur TNI, termasuk Pasukan Gerak Cepat TNI AU, untuk meningkatkan pengamanan objek vital penerbangan. Hingga kini, penutupan 11 bandara masih berlangsung seiring pengejaran pelaku. Dari pemeriksaan awal, aparat mengidentifikasi sekitar 20 orang yang diduga terlibat, dengan dua di antaranya telah teridentifikasi. (gus,p,kcm/dya)

Pengaturan Alun-alun Merdeka: PKL Dapat Ruang, Pejalan Kaki Aman

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan pengaturan baru bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Merdeka. Skema ini dirancang agar PKL tetap mendapatkan ruang untuk berusaha. Sementara trotoar kembali berfungsi optimal sebagai jalur aman bagi pejalan kaki.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan rencana penempatan PKL di Jalan Merdeka Selatan masih akan dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Nanti akan kami bahas di Forum Lalu Lintas. Karena di forum itu terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi angkutan darat (organda), pemerintah, LSM, semua elemen masyarakat termasuk pihak Masjid Jami," ujar Wahyu, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, skema tersebut akan diuji coba terlebih dahulu pada hari libur, khususnya malam Minggu atau akhir pekan. Waktu pelaksanaan direncanakan mulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 atau 10.00 WIB. Setelah itu, Wahyu menegaskan

seluruh aktivitas harus kembali tertib dan bersih.

Dalam skema awal yang akan segera dibahas, Wahyu menyebut area depan Kantor Pos dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) direncanakan untuk disterilkan dan diperuntukkan khusus bagi PKL. Sementara itu, arus lalu lintas akan direkayasa agar tetap berjalan lancar.

Dijelaskannya, kendaraan dari arah timur atau dari depan Pendopo Kabupaten Malang nantinya dapat tetap lurus menuju Jalan Kawi. Sedangkan dari arah utara, pengendara yang hendak menuju Jalan Kawi bisa melintas lurus di depan Masjid Jami' atau langsung berbelok kanan sesuai pengaturan.

"Kalau forum memperbolehkan, akan ada pengaturan. Setelah disetujui, kami uji coba dulu. Kalau memang baik, nanti bisa ditambah harinya, mungkin setiap Jumat, Sabtu, Minggu," kata Wahyu.

Selain mempertimbangkan aspek lalu lintas, Pemkot juga menghitung dampak ekonomi atau multiplier

effect dari kebijakan tersebut. Uji coba ini tidak hanya bertujuan menata kawasan, lanjut Wahyu, tetapi juga memastikan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Khusus selama Ramadan, skema serupa juga akan diterapkan. Wahyu menegaskan langkah ini dilakukan agar PKL tidak lagi masuk ke dalam area alun-alun maupun memenuhi trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

"Karena selama ini kalau Ramadan, trotoar itu akhirnya ditempati PKL. Padahal trotoar fungsinya sebagai pedestrian. Orang yang jalan kaki akhirnya turun ke badan jalan, ini berbahaya," jelasnya.



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengakui setiap Ramadan kawasan Alun-alun Merdeka kerap dipadati PKL dan parkir liar yang berdampak pada kelancaran lalu lintas. (Santi/Dya)

Jelang Ramadan, Pemkab Malang Klaim Surplus 31 Ribu Ton Beras



Ilustrasi: Stok beras di gudang Bulog Malang. (Santi/Lentera)

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengklaim ketersediaan stok beras dalam kondisi aman hingga Ramadan 2026. Data neraca perdagangan terbaru menunjukkan, terdapat surplus beras sebesar 31.282 ton. Hal ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan.

"Kami ada surplus beras sekitar

31.282 ton. Jumlah itu setara dengan ketahanan stok sekitar 1,5 bulan ke depan," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan data neraca pangan sejak Januari 2026, kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Malang yang berpenduduk sekitar 2,77 juta jiwa mencapai 44.688,28 ton per bulan.

Angka tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga.

Dengan adanya surplus tersebut, kata Mahila, total ketersediaan beras di Kabupaten Malang saat ini mencapai sekitar 75.970 ton. Ditegaskannya, kondisi tersebut membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan

bahan pangan pokok setidaknya hingga Maret 2026.

"Surplus beras tersebut bisa dijadikan cadangan pangan oleh masyarakat," imbuhnya.

Selain kuantitas, Pemkab Malang juga memastikan kualitas beras yang beredar di pasaran tergolong premium. Pasokan gabah dari petani ke penggilingan disebut berjalan lancar tanpa hambatan distribusi.

Mahila menjelaskan, pola panen yang berlangsung bergiliran di sejumlah kecamatan menjadi faktor penopang kestabilan produksi. Ketika satu wilayah belum memasuki masa panen, wilayah lain sudah mulai memanen, sehingga pasokan ke penggilingan tetap tersedia setiap hari.

Di sisi lain, stabilitas stok juga diikuti dengan relatif terkendalinya harga di tingkat eceran. Meski terdapat kenaikan pada beras kemasan besar, Mahila menyebut harga jual kepada konsumen disebut masih stabil. "Kenaikan mungkin hanya sekitar Rp 2.000 per sak (25 kilogram)," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya,

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Malang juga memastikan stok beras di wilayah Malang Raya dalam kondisi aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M Nurjuliansyah, menyebutkan stok beras yang tersimpan di empat gudang Bulog Malang saat ini mencapai 51.383 ton dan seluruhnya merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Kondisinya sangat aman sampai Lebaran karena stok di empat gudang masih 51.383 ton dan seluruhnya merupakan CBP," ujarnya.

Menurut pria yang akrab dengan sapaan Hanung ini, stok tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang, tetapi juga melayani distribusi untuk Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

"Dalam operasional harian, volume distribusi berkisar antara 80 hingga 100 ton per hari, menyesuaikan kebutuhan pasar," kata Hanung. (Santi/Dya)

ISRAEL TAHAN IMAM MASJID AL-AQSA, AKSES IBADAH DIBATASI JELANG RAMADAN

Otoritas Israel menahan imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Ali Abbasi, dan melarangnya memasuki kompleks suci itu selama satu minggu. Tindakan yang memicu kecaman dari berbagai negara ini dilakukan beberapa hari sebelum Ramadan. Pemerintah Provinsi Yerusalem, dikutip Anadolu Agency, Selasa (17/2/2026) menyatakan penahanan dilakukan pasukan Israel tanpa penjelasan alasan resmi.

Kebijakan tersebut berlangsung di tengah peningkatan pembatasan akses jamaah dan eskalasi keamanan di Yerusalem Timur. Wilayah ini diduduki Israel sejak Perang Arab-Israel pada 1967 dan dicaplok pada 1980. Padahal, statusnya tidak diakui komunitas internasional.

NEGARA -NEGARA KECAM ISRAEL SOAL TEPI BARAT

- Arab Saudi menilai langkah Israel mendaftarkan tanah Tepi Barat sebagai "milik negara" melanggar hukum internasional, merusak solusi dua negara, dan menegaskan Israel tak berdaulat atas wilayah Palestina.
- Mesir menyebut kebijakan itu eskalasi berbahaya yang melanggar hukum internasional, Konvensi Jenewa Keempat, dan Resolusi 2334 DK PBB (2016).
- Qatar mengecamnya sebagai rencana ilegal perampasan hak Palestina dan mendesak tekanan internasional agar dihentikan.
- Yordania menilai keputusan itu pelanggaran terang-terangan yang memperburuk situasi kawasan.
- Turki menyebut langkah tersebut batal demi hukum, memperluas permukiman, dan merusak prospek perdamaian.
- Indonesia bersama negara Arab dan mayoritas Muslim mengutuk kebijakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional yang mempercepat aneksasi dan berisiko memicu konflik lebih luas.



SERANGAN terbaru Israel ke wilayah Gaza, Palestina, kembali menuai kecaman. Laporan Al Jazeera menyebut penggunaan senjata thermal dan bom vakum dalam operasi militer yang disebut menghantam warga sipil.

Menanggapi laporan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penggunaan senjata semacam itu sebagai tindakan yang melampaui batas kemanusiaan dan mencederai nurani publik global.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar



Petugas polisi perbatasan Israel mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem, pada Maret 2024. (Dok.Flash90)

Masjid Al-Aqsa merupakan situs suci ketiga bagi umat Islam. Di sisi lain, umat Yahudi menyebut kawasan itu sebagai Bukit Bait Suci, yang diyakini sebagai lokasi dua kuil kuno.

Di lapangan, kekerasan juga

berlanjut di Gaza. Laporan AFP menyebut serangan Israel menewaskan sedikitnya 12 orang, meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat disebut memasuki fase kedua. Badan

Dugaan Senjata Termal di Gaza, MUI Pertanyakan Peran Board of Peace

Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan setelah membaca laporan investigatif terkait dugaan penggunaan senjata tersebut terhadap warga sipil Palestina.

"Saya shock dan sekaligus geram membaca hasil investigasi yang disampaikan Al Jazeera terkait dugaan penggunaan senjata thermal atau bom vakum dalam agresi militer Israel di Gaza. Ini menelan korban lenyap seketika tak tersisa sebesar 2.842 orang," ujarnya, dikutip dari situs resmi MUI pada Selasa (17/2/2026).

Ia menuturkan bahwa laporan mengenai ribuan warga Palestina yang dilaporkan lenyap tanpa jejak akibat suhu ekstrem dari senjata tersebut semakin memperpanjang daftar tragedi kemanusiaan di wilayah konflik.

"Senjata yang mampu menghasilkan suhu hingga ribuan derajat celcius dan menyebabkan tubuh manusia hancur tanpa sisa adalah bentuk kekerasan yang sangat menjijikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter

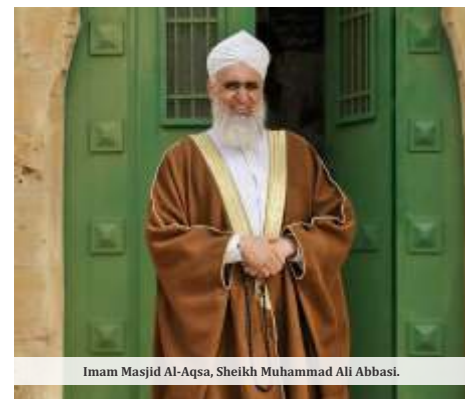
internasional," kata Prof. Sudarnoto.

Menurutnya, apabila penggunaan senjata tersebut terbukti dilakukan Israel, maka tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa serta norma hukum internasional. MUI menilai dunia internasional tidak seharusnya bersikap diam, apalagi menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Setiap dugaan kejahatan, lanjutnya, harus diselidiki secara independen dan transparan, serta para pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional yang berlaku.

Selain itu, MUI juga mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai dosa kemanusiaan Israel yang dinilai terus dibiarkan dan didukung.

"Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa tragedi kemanusiaan di Palestina bukan hanya isu nasional, melainkan persoalan moral dan kemanusiaan universal," ujar Prof. Sudarnoto. (gus,rls/dya)



Imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Ali Abbasi.

pertahanan sipil yang beroperasi di bawah otoritas Hamas melaporkan serangan menghantam tenda pengungsi di Jabalia, Gaza utara, serta wilayah Khan Yunis di selatan.

Rumah sakit Al-Shifa dan Nasser mengonfirmasi telah menerima sedikitnya tujuh jenazah.

"Israel tidak memahami gencatan senjata atau perdamaian," kata Osama Abu Askar, warga yang kehilangan keponakannya dalam serangan di Jabalia. Ia menyebut korban tewas saat mereka tidur.

Tepi Barat Didaftarkan Jadi 'Tanah Negara'

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengecam keputusan otoritas Israel melanjutkan prosedur pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat yang diduduki.

"Sekretaris Jenderal mengecam keputusan otoritas Israel pada 15 Februari untuk melanjutkan prosedur pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat yang diduduki, menyusul keputusan kabinet pada Mei 2025," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.

Dujarric memperingatkan kebijakan tersebut berpotensi merampas hak milik warga Palestina dan memperluas kendali Israel atas wilayah itu.

"Langkah-langkah semacam itu, termasuk keberlanjutan kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina, bukan hanya bersifat destabilisasi tetapi juga, sebagaimana diingatkan Mahkamah Internasional, yakni melanggar hukum," ujarnya.

PBB menegaskan kembali bahwa seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur, "tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional serta resolusi PBB yang relevan."

Guterres juga menyerukan agar Israel "segera membatalkan langkah-langkah tersebut" dan menegaskan solusi dua negara melalui perundingan sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang langgeng. (mem,ana,ist/dya)



Benarkah Jajan Sembarangan Bisa Melatih Imun Anak? Ini Kata Dokter

Terkadang lingkungan yang sangat steril tidak optimal untuk perkembangan sistem imun anak. Interaksi yang dialami oleh anak dengan alam dan paparan mikroba yang beragam di awal kehidupan cenderung bisa membangun sistem imun yang lebih kuat.

Menurut dokter spesialis anak Susanti Himawan, jika anak langsung terpapar langsung dengan mikroba yang beragam maka tidak bisa diartikan sebagai higienitas yang buruk.



“Jadi, memaparkan mikroba itu memang baik. Tapi, tidak sama dengan higienitas yang buruk. Tetap harus dijaga higienitas,”

dr. Susanti Himawan, Sp.A
Dokter Spesialis Anak

“Memaparkan ke berbagai mikroba itu sangat baik untuk perkembangan imun tubuh setiap anak. Tapi, itu tidak sama dengan higienitas yang buruk,” kata dr. Susanti.

Menurut dokter Susanti, paparan terhadap mikrobiota dan antigen, yang dimaksud di sini adalah kuman dan elemen di lingkungan sehari-hari. Seperti bermain di tanah, berinteraksi dengan hewan peliharaan, atau sekedar bermain ketaman.

Aktivitas ini dinilai cukup agar tubuh mudah mengenali berbagai macam antigen sehingga antibodi bisa terbentuk lebih baik. Paparan mikroba yang berbagai macam dan bisa membantu mengatur respons imun dan menurunkan risiko alergi, eksim, dan asma.

Makanan warung tidak selamanya buruk

Menurut dr. Susanti, terkait konsumsi makanan, kebersihan dan keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas. Ia menyebutkan bahwa,

makanan warung atau jajanan kaki lima boleh-boleh saja untuk dikonsumsi oleh anak selama makanannya tersebut mengandung gizi, diolah dengan bersih, dan tidak mengandung bahan yang berbahaya.

“Jadi, memaparkan mikroba itu memang baik. Tapi, tidak sama dengan higienitas yang buruk. Tetap harus dijaga higienitas,” kata dr. Susanti.

Tidak hanya itu, mengonsumsi snack yang ringan seperti keripik atau makanan kemasan lain di minimarket, minuman yang tinggi gula, sebaiknya dibatasi dalam pengonsumsiannya makanan seperti itu.

“Mungkin ada bahan pengawet, kadar natrium atau garam-garamnya juga tinggi, berisiko anaknya mengalami hipertensi,” ujar dr. Susanti.

Peran orangtua juga sangat diperlukan dalam memperhatikan makanan yang dicerna. Lebih baik jika membuat jajan sendiri karena bahan-bahan yang digunakan, pengolahan, lebih kesehatan dan higienitasnya.

“Bikin kripik tempe sendiri kalau orangtuanya rajin. Lalu buah. Kalau mau lebih repot lagi, misalnya buat risol dan lain sebagainya. Itu malah lebih bergizi,” tambahan dr. Susanti.

Jajanan telur gulung atau cilok juga lebih disarankan para orang tua untuk membuat sendiri untuk memastikan kesehatan anak. Menurut dr. Susanti, orang tua tidak mengetahui kondisi minyak yang dipakai atau adanya tambahan bahan lain dalam jajanan luar. Selain itu, proses pengolahan dan kebersihan peralatan yang digunakan juga tidak selalu terjamin. Oleh karena itu, memasak di rumah dinilai lebih aman untuk langkah pencegahan yang maksimal, sekaligus memberi kesempatan bagi orang tua untuk memilih bahan yang lebih segar dan berkualitas.

“Kalau homemade, kita tahu bahannya, kualitasnya, cara pembuatannya. Masih mending orangtua masak sendiri di rumah,” pungkas dr. Susanti. (Itqiyah_UINSA yang berkontribusi dalam tulisan ini)

Beberapa kegiatan seru untuk melatih imunitas anak

■ Aktivitas Outdoor (Luar Ruangan)

Berjemur di Pagi Hari

: Rutin dilakukan untuk mencukupi kebutuhan vitamin D.

Bersepeda atau Jalan Santai

: Membantu meningkatkan stamina dan sirkulasi darah.

Berkebun atau Bermain Tanah

: Memaparkan anak pada bakteri baik membantu memperkuat sistem

■ Kebiasaan Pendukung Imunitas

Mencuci Tangan

: Mengajarkan anak mencuci tangan mencegah kuman masuk.

Istirahat Cukup

: Saat tidur, tubuh memproduksi sel darah putih melawan infeksi.

Nutrisi Seimbang

: Cukupi sayur, buah, dan protein untuk mendukung sistem imun.

Seni Cadas Pulau Muna Ungkap Jejak Migrasi Jalur Utara ke Australia

Penemuan Seni Cadas tertua di Sulawesi tidak hanya berdampak pada sejarah seni dunia, tetapi dapat membawa implikasi besar terhadap pemahaman migrasi manusia modern menuju Australia.

Para peneliti membuktikan bahwa penemuan ini memastikan bahwa manusia modern sedang berada di kawasan Sulawesi setidaknya 67.800 tahun lalu.

Sehingga penemuan ini menjadi bukti bahwa manusia menggunakan jalur utara migrasi, dengan melintasi wilayah Borneo-Sulawesi sebelum akhirnya mencapai Australia Papua.

Kesimpulan ini sekaligus menuntaskan perdebatan panjang dalam bidang arkeologi terkait jalur migrasi manusia awal, yakni apakah melalui rute selatan lewat Timor atau rute utara untuk melalui kawasan Wallacea.

Berdasarkan temuan terbaru, dapat dipastikan bahwa manusia menempuh jalur utara untuk mencapai Australia.

"Kita tahu dengan yakin mereka menggunakan rute utara untuk mencapai Australia, kita tidak tahu apakah mereka masih menggunakan rute utara, tapi kita tahu dengan yakin mereka berada di sini," ujar Maxime Aubert, arkeolog dari Griffith University, yang ikut terlibat dalam penelitian ini, Kamis (22/1).

Pada masa tersebut, daratan Australia dan Papua masih tergabung akibat permukaan laut yang lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Meskipun demikian, manusia tetap harus menyebrangi lautan untuk mencapai wilayah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan navigasi serta teknologi

maritim manusia pada masa itu jauh lebih maju daripada yang selama ini diperkirakan.

Para peneliti juga menekankan bahwa sebagian besar situs arkeologi tertua di Australia berumur sekitar 50.000 tahun, sedangkan situs yang diperkirakan berusia antara 60.000 hingga 65.000 tahun masih menjadi bahan perdebatan ilmiah.

Dengan adanya bukti keberadaan manusia di Sulawesi 67.800 tahun lalu, argumen migrasi awal ke Australia menjadi semakin kuat dan berbasis



data yang lebih benar.

"Tempat yang berkaitan dengan 60-65, tidak semua orang percaya, tapi sekarang kita benar-benar menunjukkan bahwa manusia berada di sini, dibagian dunia itu, 68.000 tahun lalu," ungkap Maxime.

Penelitian ini tidak hanya mengungkap sejarah seni, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai wilayah kunci dalam studi evolusi dan migrasi manusia. Temuan ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk menggali lebih banyak bukti arkeologis di kawasan Wallacea yang selama ini belum sepenuhnya

terungkap. Para peneliti menyatakan bahwa cap tangan pada lukisan gua bukanlah fenomena yang hanya ditemukan di Indonesia.

Motif serupa juga dijumpai di berbagai wilayah dunia, seperti Eropa, Argentina, Papua Nugini, dan Australia Utara.

Meski demikian, Sulawesi dan Kalimantan menunjukkan ciri khas lokal, antara lain bentuk jari yang runcing atau dimodifikasi, keberadaan pola titik dan garis di dalam cap tangan yang menyerupai tato, serta perpaduan cap tangan

dengan motif lain, termasuk figur hewan dan simbol-simbol abstrak. Makna simbolis dari gambar-gambar tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan.

Para peneliti menegaskan pentingnya penerapan pendekatan lintas disiplin yang meliputi arkeologi, etnografi, sejarah seni, hingga kajian keagamaan untuk menafsirkan maksud yang terkandung di balik representasi visual tersebut, sehingga pemahaman terhadap kehidupan dan kepercayaan manusia purba dapat semakin komprehensif. Melalui kolaborasi berbagai bidang ilmu ini, interpretasi tidak hanya bertumpu pada aspek visual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan spiritual masyarakat pada masanya. Dengan demikian, setiap simbol, pola, maupun figur yang tergambar di dinding gua dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menyeluruh, serta membantu merekonstruksi cara berpikir dan sistem nilai yang berkembang pada periode prasejarah. (Ella-UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG: SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO: IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Tampil Mewah Tanpa Gerah dengan **Outfit Silk-Look**

Model outfit silk-look yang adem dan elegan kini semakin menjadi primadona di dunia fashion. Hal tersebut tidak lepas dari kemampuannya menghadirkan kesan mewah tanpa harus mengorbankan kenyamanan saat dikenakan. Kalau lembut yang dihasilkan oleh bahan seperti Armani Silk atau Satin Silk premium mampu menciptakan siluet tubuh yang jatuh dengan anggun dan terlihat berkkelas. Karakter kainnya yang

halus dan ringan membuat outfit berbahan silk-look cocok digunakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari acara formal hingga gaya semi-kasual yang tetap stylish.

Selain memberikan tampilan visual yang elegan, bahan silk-look juga dikenal memiliki tekstur yang terasa dingin di kulit. Keunggulan ini menjadikannya pilihan ideal untuk digunakan di negara beriklim tropis, di mana kenyamanan tetap menjadi prioritas utama. Agar penampilan semakin maksimal, pemilihan potongan yang tepat serta palet warna lembut seperti earth tone dan pastel sangat disarankan.

Warna-warna tersebut mampu memperkuat aura eksklusif sekaligus menciptakan kesan tenang dan dewasa pada keseluruhan look.

Berikut ini beberapa model outfit silk-look yang dapat menjadi

inspirasi untuk tampil anggun di berbagaisuasana.

Gamis A-Line Minimalis

Model outfit silk-look yang adem dan elegan ini menonjolkan potongan melebar dari bagian pinggang ke bawah sehingga memberikan ruang gerak yang maksimal. Penggunaan bahan silk yang ringan membantu menjaga sirkulasi udara tetap baik, sehingga nyaman dikenakan sepanjang hari tanpa terasa gerah.

Kemeja Oversize Silk

Atasan dengan potongan longgar ini memberikan kesan modern sekaligus santai. Meski terlihat kasual, efek kilau dari bahan silk tetap menghadirkan sentuhan profesional. Kemeja ini sangat cocok dipadukan dengan celana bahan untuk tampilan rapi atau denim untuk gaya yang lebih effortless.

Slip Dress Layering

Model outfit silk-look yang adem dan elegan dalam bentuk slip dress semakin menarik saat dipadukan dengan outer transparan atau sheer. Kombinasi ini menciptakan dimensi visual yang cantik dan feminin, sehingga sangat populer untuk acara pesta malam atau makan malam romantis yang berkkelas.

One-Set Pajama Style

Setelan silk-look berupa kemeja dan celana panjang kini menjadi tren sebagai busana luar ruang yang chic. Teksturnya yang sangat halus memberikan kenyamanan layaknya pakaian rumah, namun tetap terlihat modis dan rapi saat digunakan untuk hangout atau acara semi-formal.

Wrap Blouse Serut

Model blouse dengan detail tali serut di bagian pinggang mampu membentuk siluet tubuh secara lembut dan manis. Aksen lipatan alami pada

bahan silk menambah kedalaman tekstur yang membuat tampilan terlihat semakin mewah tanpa kesan berlebihan.

Kulot High-Waisted Silk

Celana berpotongan lebar dengan pinggang tinggi ini efektif menciptakan ilusi kaki yang lebih jenjang. Karakter bahan silk yang jatuh dengan indah membuat setiap langkah terlihat anggun dan memberikan kesan berwibawa.

Abaya Modern Tanpa Kerah

Model outfit silk-look yang adem dan elegan berbentuk abaya simpel ini cocok bagi pencinta gaya modest yang timeless. Potongannya yang longgar mampu menyamarkan lekuk tubuh, namun tetap mempertahankan kesan high-end berkat kilau halus dari bahan silk.

Tunik Asimetris

Atasan dengan potongan asimetris memberikan sentuhan artistik pada penampilan sehari-hari agar tidak terlihat monoton. Kalau bahan silk menjadikan detail potongan yang tidak simetris tersebut sebagai pusat perhatian yang menarik.

Kaftan Silk Bordir

Kaftan berbahan silk dengan sentuhan bordir minimalis merupakan pilihan klasik untuk momen spesial seperti hari raya atau acara keluarga. Perpaduan unsur tradisional dan kemewahan modern membuat model ini selalu relevan dan elegan.

Blazer Ringan Silk

Menggunakan blazer berbahan silk tipis sebagai outer menjadi cara instan untuk meningkatkan kesan formal sebuah outfit. Selain mampu menutupi lengan, blazer ini tetap terasa sejuk dan ringan sehingga nyaman digunakan. (Masykurotul_UINSA yang berkontribusi dalam tulisan ini).



Kemeja Oversize Silk



Slip Dress Layering



One-Set Pajama Style



Wrap Blouse Serut

Klaim Tak Teken, ...dari hal 1

Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengenai dukungannya terhadap revisi ulang Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantik rangkaian respons dari lembaga negara, parlemen, hingga pegiat antikorupsi. Usai menyaksikan pertandingan sepak bola di Solo, ia menyatakan setuju revisi ulang UU KPK sekaligus menegaskan tidak pernah menandatangani perubahan undang-undang tersebut pada 2019. Ia juga menyebut revisi saat itu merupakan inisiatif DPR.

Di internal lembaga antirasuah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johanis Tanak, menilai gagasan “mengembalikan” UU KPK ke kondisi sebelum revisi tidak relevan secara konseptual. “Apanya yang mau dikembalikan, UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi,” ujarnya dijutip Selasa (17/2/2026).

Ia menegaskan KPK menjalankan tugas berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, baik UU lama maupun UU hasil revisi. Menurut dia, perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara memberi kepastian hukum. Jika penguatan independensi menjadi tujuan, revisi semestinya berfokus pada penempatan KPK dalam rumpun yudikatif, bukan eksekutif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.

Respons juga datang dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menilai klaim Jokowi tidak berperan dalam pengesahan revisi UU KPK 2019 tidak tepat. Ia menyatakan pemerintah mengirim perwakilan untuk membahas perubahan undang-undang bersama DPR. “Revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak adanya tanda tangan presiden tidak memengaruhi keberlakuan undang-undang. Mengutip Pasal 20 UUD 1945, ia menegaskan rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan presiden, serta tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan kepala negara.

Sejumlah mantan penyidik KPK melihat pernyataan Jokowi dari sudut tanggung jawab moral. Yudi Purnomo menyambut baik dukungan revisi ulang, seraya

menilai revisi 2019 telah melemahkan lembaga antirasuah. Ia mendorong pemulihan independensi KPK melalui penguatan kewenangan, kepemimpinan berintegritas, serta perubahan status kelembagaan menjadi non-eksekutif.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan 57 pegawai yang tersingkir. “Itulah sebabnya saya berharap dorongan untuk kembali ke UU KPK yang lama bisa bergulir bagai bola salju,” katanya.

Nada lebih keras disampaikan pegiat masyarakat sipil. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai pernyataan Jokowi paradoksal dan terkesan sebagai upaya “mencuci tangan”. Ia menyebut proses revisi berlangsung singkat, sekitar 13 hari, dan menilai kontribusi presiden saat itu signifikan.

Wana merujuk pada penerbitan surat presiden pada 11 September 2019 yang mendelegasikan menteri terkait membahas revisi bersama DPR, serta absennya penerbitan Perppu meski terjadi gelombang protes publik.

Pandangan senada mengenai perlunya langkah konkret disampaikan mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha. Ia menilai pernyataan dukungan terhadap pengembalian UU KPK lama belum bermakna tanpa kebijakan mengikat.

“Publik tidak membutuhkan gimick silang pendapat di media, yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan,” ujarnya.

Menurut dia, pemulihan independensi KPK hanya dapat ditempuh melalui penerbitan Perppu atau revisi undang-undang bersama DPR. Ia menilai pengesahan UU 19/2019 terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dan selama periode itu tidak ada koreksi signifikan terhadap regulasi yang dinilai melemahkan kewenangan lembaga antirasuah.

Di tingkat pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan revisi ulang UU KPK masih dalam tahap kajian dengan melibatkan komunikasi bersama DPR. Ia menegaskan seluruh aspek, termasuk desain kelembagaan, akan ditelaah sesuai kebutuhan penegakan hukum tindak pidana

korupsi. “Yang lebih penting karena ini adalah politik hukum kita, komunikasi antara pemerintah dan DPR RI,” ujarnya.

Diketahui, awal mulanya adalah usulan disampaikan oleh Ketua KPK periode 2011–2015 Abraham Samad Riyanto dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jumat (30/1/2026). Dalam pertemuan itu, Abraham menilai revisi UU KPK tahun 2019 telah melemahkan peran serta kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Saat dimintai tanggapan, Jokowi menyatakan persetujuannya terhadap wacana tersebut. “Ya, saya setuju, bagus,” jawab Jokowi usai menonton laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026).

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa revisi UU KPK pada 2019 bukan berasal dari usulan dirinya sebagai presiden, melainkan merupakan inisiatif DPR RI. “Ya, memang (revisi UU KPK). Saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,” tegas Jokowi. (tin,rls,kum,ant/dya)

Pakar Hukum: Masyarakat Jangan Terkecoh

PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kerap menampilkan sikap yang dinilainya sebagai upaya mencari simpati publik.

Penilaian itu disampaikan Hudi sebagai respons atas pernyataan Jokowi yang menyatakan setuju merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 dan mengembalikannya ke regulasi sebelumnya, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002.

“Menurut saya hanya cari muka aja ke masyarakat seakan-akan yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam hal merevisi UU KPK,” kata Hudi ketika dihubungi Inilah.com, Selasa (17/2/2026).

Hudi juga mengingatkan publik agar tidak kembali terpengaruh oleh apa yang ia sebut sebagai gimik politik yang muncul setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia menyinggung berbagai isu yang belakangan mencuat, mulai dari wacana revisi UU KPK, polemik ijazah, hingga keterlibatan dalam

agenda politik keluarga.

“Karena itu saya berharap masyarakat jangan terkecoh lagi,” ujar Hudi.

Sementara, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai langkah Jokowi tidak lebih dari manuver pencitraan. Ia berpendapat isu tersebut muncul di tengah penilaian publik bahwa kinerja pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Jokowi dinilai rendah.

Menurut Jamiluddin, wacana mengembalikan UU KPK ke regulasi sebelumnya tampak sebagai upaya memperbaiki citra yang dinilainya menurun, sekaligus membangun kesan bahwa Jokowi bukan pihak yang berperan dalam pelemahan lembaga antirasuah.

Ia menilai narasi bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR dimaksudkan sebagai bentuk pembelaan diri.

Ia juga menilai sulit membayangkan perubahan undang-undang strategis seperti UU

KPK dapat berlangsung cepat tanpa persetujuan presiden. Hal tersebut, menurutnya, menguatkan anggapan bahwa pemerintah pada saat itu secara implisit memberi restu terhadap revisi yang dibahas di DPR.

Jamiluddin menambahkan, tidak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh presiden saat gelombang penolakan publik menguat menjadi indikasi lain yang memperkuat penilaiannya. Karena itu, ia menilai perubahan sikap Jokowi yang kini mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama sulit dipahami tanpa melihatnya sebagai pertimbangan politik.

Menurut dia, isu tersebut dimanfaatkan untuk membangun citra sebagai tokoh yang berpihak pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Namun, ia menilai pernyataan tersebut bersifat retorik semata dan tidak perlu ditanggapi sebagai sikap kebijakan yang substantif. (wid,ist,kum/dya)

AWAL PUASA INDONESIA TAK SERENTAK

Pemerintah Tetapkan 19 Februari, Muhammadiyah Rabu Tanggal 18

Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026). Keputusan itu diambil setelah sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/2/2026). Berbeda dengan itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu (18/2/2026). Perbedaan memang sering terjadi mengingat metode penetapannya memang tak sama.

Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026).

Ketetapan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/2/2026) malam.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, "Dengan demikian, disepakati 1 Ramadan 1447 hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026."

Penetapan tersebut merujuk pada kriteria MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dalam pemaparan Tim Hisab Rukyat, posisi hilal pada saat pemantauan berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia.

Ketinggian hilal tercatat berkisar antara minus 2,41 derajat di Jayapura hingga minus 0,93 derajat di Kepulauan Mentawai. Sudut elongasi berada pada rentang 0,94 derajat di Banda Aceh hingga 1,89 derajat di Jayapura. Dengan kondisi itu, kemungkinan hilal terlihat sangat kecil sehingga bulan Syakban



Pengamat mengamati hilal menggunakan teleskop di Menara Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (17/2/2026). (ist.kumparan)

digenapkan menjadi 30 hari.

Sebelum keputusan pemerintah diumumkan, potensi perbedaan awal puasa telah mengemuka. Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah menjadi faktor utama. Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan hisab dan rukyat serta mengikuti penetapan pemerintah melalui mekanisme ikhbar.

Berdasarkan hisab Lembaga Falakiah PBNU, ijtima terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB dengan

posisi hilal minus 1 derajat 44 menit. Posisi itu menandakan hilal masih berada di bawah ufuk, sehingga awal Ramadan diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026, menunggu keputusan sidang isbat.

Berbeda dengan itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berbasis hisab

NEGARA YANG MENETAPKAN AWAL RAMADAN

Kamis (Asia, Eropa, Australia)

- Arab Saudi
- UEA
- Qatar
- Turki
- Jerman
- Indonesia*
- Malaysia
- Singapura
- Australia
- Prancis
- Inggris

(*perkiraan sebagian otoritas/komunitas)

Rabu (Amerika Utara)

- Amerika Serikat
- Kanada

murni dengan konsep satu hari satu tanggal global. Keputusan itu dituangkan dalam surat resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.1/B/2026. Peninjauan ulang terhadap data astronomis global dan validasi parameter KHGT menjadi dasar perubahan dari kalender cetak sebelumnya.

Muhammadiyah menjelaskan bahwa sistem kalender global memandang bumi sebagai satu kesatuan waktu. "Penetapan awal Ramadan 1447 H yang jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, telah memantik diskusi kritis di tengah masyarakat, khususnya terkait penggunaan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan," tulis Muhammadiyah.

Organisasi itu menegaskan bahwa dalam KHGT, jika parameter keterlihatan bulan terpenuhi di suatu tempat di bumi dalam satu siklus hari global, maka status bulan baru berlaku untuk seluruh wilayah pada tanggal yang sama.

Muhammadiyah juga menekankan pembedaan antara konsep waktu dan tanggal.

Umat Islam, menurut penjelasan itu, tetap menjalankan ibadah puasa berdasarkan waktu setempat, dari fajar hingga magrib, meskipun penentuan tanggal mengikuti sistem global. Garis Tanggal Internasional dijadikan titik awal perhitungan hari, sebuah praktik yang dinilai sejalan dengan konvensi waktu yang selama ini digunakan dalam kehidupan global, termasuk dalam penentuan hari Jumat.

Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan kerangka fikih dan metodologi astronomi yang tidak sepenuhnya seragam. Pemerintah memadukan hisab dan rukyat sebagai dasar penetapan nasional, sedangkan Muhammadiyah menggunakan sistem kalender global yang telah ditetapkan sebelumnya. (tin,rls,ant/dya)

Negara-negara di Dunia Mayoritas Kamis, Amerika Utara Tetapkan Rabu

MAYORITAS negara di Asia, Eropa, dan Australia menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis (19/2/2026). Sementara itu, komunitas Muslim di Amerika Utara memulai puasa sehari lebih awal, Rabu (18/2/2026), berdasarkan perhitungan astronomi.

Di Australia, otoritas keagamaan menyatakan bulan baru lahir setelah matahari terbenam pada 17 Februari waktu setempat, sehingga Ramadan tidak dimulai pada malam itu. "Bulan Suci Ramadan tahun ini 1447H-2026 akan dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026. Malam pertama Bulan Suci Ramadan dan Salat Tarawih akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, setelah Matahari Terbenam (Setelah Salat Isya)," demikian pengumuman Dewan Fatwa Australia.

Keputusan serupa diambil Singapura yang menggunakan hisab tanpa pemantauan hilal. Otoritas

agama setempat menyatakan posisi bulan terbenam sebelum matahari pada 17 Februari, sehingga pengamatan hilal tidak memungkinkan. Negara lain seperti Oman, Turki, dan Prancis juga menetapkan 19 Februari sebagai awal puasa.

Di Eropa, European Council for Fatwa and Research menilai meski konjungsi astronomis terjadi pada 17 Februari, hilal tidak mungkin terlihat pada malam itu baik dengan mata telanjang maupun instrumen pengamatan. Keputusan ini menjadi rujukan bagi sejumlah komunitas Muslim di kawasan tersebut.

Di Asia dan Afrika, kecenderungan serupa muncul. Posisi bulan pada 17 Februari dinilai belum memenuhi syarat visibilitas di banyak wilayah, sehingga bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari dan Ramadan dimulai pada 19

Februari. Di Timur Tengah, sebagian negara menunggu kesaksian rukyat yang diverifikasi otoritas resmi, termasuk pengumuman final dari Arab Saudi.

Berbeda dengan itu, komunitas Muslim di Amerika Serikat dan Kanada yang mengikuti Fiqh Council of North America menetapkan 1 Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026. Lembaga tersebut mengakui hisab sebagai metode syar'i yang sah. "Jika syarat ini terpenuhi, maka dapat dipastikan bulan sudah berada di atas cakrawala dan dapat terlihat di suatu tempat di bumi.

Karena itu, bulan baru dimulai keesokan harinya," jelas FCNA. Mereka menambahkan, "Karena itu, hari pertama Ramadan adalah Rabu, 18 Februari 2026, insyaallah. Salat tarawih dimulai pada Selasa malam." (wid,rtr,ist/dya)